



al-Hikmah

PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN ISLAM

**Demokrasi Pendidikan dalam
Perspektif Pendidikan Islam**

Oleh : Masdar Limbong

**Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Keberhasilan Belajar**

Oleh : Kasron Nasution

**Peranan Orang Tua dalam Mendidik Anak
Berdasarkan Hadis Nabi**

Oleh: Muhammad Nuh Siregar

**Penghayatan dan Pengamalan Tasawuf sebagai
Manifestasi Taqarrub Ila Allah**

(Via Stasiun Ma'rifah dan Mahabbah)

Oleh: Nurcahaya

**Pentingnya Desain Pembelajaran
Dalam Pelaksanaan Tugas Guru**

Oleh : Lisnawati

Studi Ilmu Hadis

Oleh : Nurliana AR

**Strategi Dan implementasi Pengembangan
Profesi Konselor Sekolah Di Indonesia**

Oleh : Khairuddin Tambusai



JURNAL ILMIAH al-Hikmah

PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN ISLAM

STRUKTUR ORGANISASI
JURNAL STAI AL-HIKMAH MEDAN

Pelindung:

Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara

Penasehat:

Ir.H. Marapinta Harahap, MM, MAP (Ketua Yayasan PETIA Medan)

Penanggung Jawab

Drs. Masdar Limbong, M.Pd (Ketua STAI AL-Hikmah)

Pengarah:

Drs. Zainuddin Siregar, SH, SE, MM, Dr. Muslich Lufti, M.BA, Dr. Sukiman, M.Si,
Drs. Maqmur Limbong, MA, Dra. Sriani

Pimpinan Redaksi:

Muhammad Nuh Siregar, MA

Redaktur Pelaksana:

Muhammad Ramadhani, S.Pd.I, Lisnawati, S.Si, S.Pd.I, M.M.Pd

Sekretaris Redaksi:

Dra. Hj. Nurliana AR, MA, Dr. Syukri, MA, Muhammad Nasir, S.Ag, S.Pd.I, M.Pd.I
Bendahara :

Dra. Azizah Hanum OK, M.Ag

Staf Ahli:

Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, MA, Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, M.Ag,
Prof. Dr. Syaiful Ahyar Lubis, MA

Distributor:

Nikmah, S.Ag, Hajjah S, S.Pd.I, Mulyana, S.Pd.I
Siti Rahmah Hasibuan, S.Pd.I

Alamat Redaksi:

Pusat Penelitian STAI Al-Hikmah Medan
Jl. Mesjid No. 1 Medan Estate Telp. 061-7351538
Email : al_hikmah_medan@yahoo.com
Website : www.stai-alhikmahmedan.ac.id.

Al-Hikmah merupakan jurnal ilmiah bidang pendidikan dan pemikiran Islam, terbit pertama kali pada Pebruari 2005, dengan frekuensi terbit dua kali setahun (1 kali enam bulan). Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pencerdasan dan pengembangan kreativitas sivitas akademika STAI Al-Hikmah Medan Sumatera Utara. Redaksi menerima karya ilmiah dalam bentuk: artikel, hasil penelitian, resensi buku, orasi ilmiah dan hasil wawancara yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Panjang Tulisan antara 10-15 halaman kuarto, Spasi 1,5 dan disertakan disketnya. Redaksi berhak mengedit naskah yang akan dimuat, tanpa harus mengubah makna.



JURNAL ILMIAH al-Hikmah

PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Daftar Isi

Kata Sambutan Ketua STAI Al-Hikmah Medan

Demokrasi Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam

Oleh : Masdar Limbong 1

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Belajar

Oleh : Kasron Nasution 19

Peranan Orang Tua dalam Mendidik Anak Berdasarkan Hadis Nabi

Oleh: Muhammad Nuh Siregar..... 29

Penghayatan dan Pengamalan Tasawuf sebagai Manifestasi Taqrrub Ila Allah (Via Stasiun Ma'rifah dan Mahabbah)

Oleh: Nurcahaya..... 43

Pentingnya Desain Pembelajaran dalam Pelaksanaan Tugas Guru

Oleh : Lisnawati 56

Studi Ilmu Hadis

Oleh : Nurliana AR..... 74

Strategi Dan implementasi Pengembangan Profesi Konselor Sekolah Di Indonesia

Oleh : Khairuddin Tambusai 91

KATA SAMBUTAN KETUA STAI AL-HIKMAH MEDAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang melimpahkan rahmat dan karunianya atas terbitnya jurnal ilmiah al-Hikmah Pendidikan dan Pemikiran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan Vol. 5 No. 5 tahun 2009. Salawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah saw. yang telah memberikan bimbingan untuk keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat.

Salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi ialah penelitian sebagai upaya untuk menemukan berbagai konsep keilmuan Islam khususnya di bidang pendidikan dan pemikiran Islam. Hasil penelitian para dosen inilah yang dituliskan dan dituangkan dalam jurnal al-Hikmah ini. Wacana-wacana ilmiah semacam ini dapat menambah khazanah ilmiah ilmu Islam dan dapat dibaca oleh civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan dan masyarakat umum.

Terbitan jurnal kali ini memuat wacana ilmiah tentang demokrasi pendidikan dalam pendidikan islam, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar, peranan orang tua dalam mendidik anak berdasarkan Hadis, penghayatan dan pengamalan tasawuf sebagai manifestasi taqrrub ila Allah, pentingnya desain pembelajaran dalam pelaksanaan tugas guru, studi ilmu Hadis dan strategi dan implementasi pengembangan profesi konselor sekolah di Indonesia. Hasil penelitian dosen-dosen Al-Hikmah ini diharapkan dapat menjadi input bagi perbaikan kualitas STAI Al-Hikmah Medan ke depan.

Jurnal al-Hikmah ini diharapkan terus diterbitkan secara berkala yang akan mengetengahkan penelitian-penelitian, pikiran-pikiran ilmiah para dosen STAI Al-Hikmah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa STAI Al-Hikmah Medan dan umumnya masyarakat muslim. Mudah-mudahan jurnal ini tetap eksis dan berdaya guna bagi kemajuan Islam.

Medan, Desember 2014
Ketua STAI Al-Hikmah Medan

dto.

Drs. Masdar Limbong, M.Pd

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Khatib, 'Ajjaj Muhammad, *Usul al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu*, Cet. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975 M/ 1395)
- _____, *As-Sunnah Qabla Tadwin*, Cet. 5, (Beirut : Dar al-Fikr. 1981 M/1401 H.)
- Ash-Shalih, Subhi, *Ulum al- Hadis wa Musthalahuhu*, Cet.17, (Beirut, Dar Ilmi Lilmalayin, 1988)
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Sejarah Perkembangan Hadis*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973)
- Hasyim, Ahmad Umar, *Qawaid Ulum al-Hadis*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.)
- Muddasir, H, *Ilmu Hadis*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007)
- Thahhan, Mahmud, *Ilmu Hadis Praktis*, Terj.Abu Fuad, (Bogor : Pustaka Thariqul Izza, 2009)
- Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, (Jakarta : Mutiara sumber Widya, 2001)

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PROFESI KONSELOR SEKOLAH DI INDONESIA

Oleh: Khairuddin Tambusai

School counselor is an educator, which is basically a psychology teacher at the school. as an educator, the improvement of scientific qualification is compulsory. in this case, there are at least two institutions was instrumental in implementing this regard, the government and professional organizations guidance and counseling (ABKIN). in the process of improving the competence of counselors, government's role here include (1) the Government has formulated a complete curriculum in creating a professional counselor. The curriculum is not hany on educational assessment, but also on the study of the profession or referred by a counselor with a degree in counselor education abbreviated Kons, (2) The Government has established a program to increase the competence through professional education counselor who has been mandated by law. further the role of professional organizations advance of others: (1) Preparing counselor education, (2) Preparation of counselor competence, (3) Structuring professional education counselor, (4) Implementation of guidance and counseling services in the formal education, (5) Appoinment standard academic qualifications and competence of counselors, (6) Guidance and counseling teacher certification, (7) Draft Ministerial Regulation on Professional Education counselor, (8) Inaugural graduate Counselor Education Profession in this case at the State University of Padang (UNP) Education and Certification Paths in this case at the Jakarta State University (UNJ), (9) Facilitate the development of guidance and counseling curriculum or Profession (between Chairman of the Program Guidance and Counseling Specialist Counseling and ABKIN), (10) Appointment of Teachers Guidance and Counseling (to the Department of Education), (11) Provide input to the draft guidance of teachers and supervisory duties, khusu of guidance and counseling, (12) Provide input to the work load and the ratio of teachers guidance and counseling, (13) Participation in disaster, especially natural disasters.

A. Pendahuluan

Sesungguhnya konselor sekolah atau guru pembimbing merupakan tenaga pendidik. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, di dalamnya bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan

Sebagai pendidik atau konselor sekolah bertanggung jawab dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang mana bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral dari pelayanan pendidikan. Bentuk pelayanan yang diberikan baik secara individu maupun secara kelompok bertujuan agar peserta didik dapat mengenal dan menerima lingkungan secara positif dan dinamis, serta mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mewujudkan diri sendiri secara efektif dan produktif sesuai dengan peranan yang diinginkan di masa depan melalui jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling berdasar norma-norma yang berlaku.

Tugas konselor sekolah di sekolah adalah terkait dengan tugas pokok berkenaan dengan pelayanan BK menurut Gibson dan Mutchell² mengemukakan tugas konselor sekolah meliputi mengenal siswa dengan berbagai karakteristiknya, konseling perorangan, bimbingan dan konseling kelompok, melaksanakan bimbingan karier termasuk informasi pendidikan dan karier, penempatan, tindak lanjut dan penilaian, konsultasi dengan guru, semua personil sekolah, orang tua, siswa, kelompok dan masyarakat.

Konselor Sekolah harus memiliki kemampuan dan kompetensi. Kompetensi merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, yang dimiliki seseorang yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan atau diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tersebut. Kompetensi konselor dalam Naskah Akademik Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal meliputi; 1) Memahami (*Counseling Services For All Human Development*) secara mendalam konseling yang hendak dilayani, 2) Menguasai landasan teoritik bimbingan dan

¹ Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Ikrar Mandiri, 1977), h. 24

² Gibson, R.L. & Mitchell, M.H, *Introduction to Guidance*, (New York: Macmillan Publisher, 1997), h. 17.

konseling dan, 3) Menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan siswa atau peserta didik.

B. Perkembangan Bimbingan dan Konseling

Menurut Wicke Octora Olivia, (2012) bahwa bimbingan dan konseling sebagaimana yang dikenal sekarang ini sesungguhnya lahir pada tanggal 13 Januari 1908 di Amerika, ditandai dengan didirikannya *vocational bureau* tahun 1908 oleh Frank Parsons. F. Parsons inilah yang selanjutnya dikenal sebagai "*Father of The Guidance Movement in American Education*". Dalam pikirannya dikemukakan bahwa setiap individu perlu diberikan pertolongan agar mereka dapat mengenal atau memahami dirinya (pemahaman individu). Yaitu mengetahui dengan tepat dan benar mengenai berbagai potensi (kecerdasan, bakat, minat, dll) serta berbagai kelemahan yang ada pada dirinya dengan tujuan agar dapat dipergunakan secara tepat dengan memilih pekerjaan yang terbaik yang tepat bagi dirinya).

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa di sinilah pertama kalinya istilah Bimbingan (*Vocational Guidance*) dikenal, tepatnya pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di Boston. Dengan didirikannya biro yang bergerak di bidang profesi dan ketenaga kerjaan. Dengan tujuan membantu para pemuda dalam memilih karier yang tepat atau sesuai dengan bakat dan minat serta melatih para guru untuk memberikan layanan bimbingan di sekolah.

Pada masa yang hampir bersamaan, seorang konselor di Detroit Jasse B. Davis mulai memberikan layanan Konseling Pendidikan dan pekerjaan di SMA (1898). Dan pada tahun 1907 ia mencoba memasukkan program Bimbingan (*Guidance*) ke dalam pengalaman pendidikan para siswa *Central High School* di Detroit.

Selanjutnya Eli Weaver pada tahun 1905 mendirikan sebuah komite yang diketuainya sendiri yaitu *Students Aid Committee Of The High School* di New York. Dalam pengembangan komitennya, Weaver sampai pada kesimpulan bahwa siswa butuh saran dan konsultasi sebelum mereka masuk dunia kerja. Pada tahun 1920-an, para konselor sekolah di Boston dan New York diharapkan dapat membantu para siswa dalam memilih sekolah dan pekerjaan. Selama tahun 1920-an itu pula, sertifikasi konselor sekolah mulai diterapkan pada kedua kota tersebut.³

Jika dilihat dari perkembangannya, bimbingan dan konseling pada mulanya hanya dikenal sebatas pada bimbingan pekerjaan (*Vocational*

³ (Bimo Walgito, 2010:15)

Guidance), sebagaimana peran dari biro yang didirikan Frank Parson di Boston itu. Namun sebenarnya lebih dari itu perkembangan bimbingan konseling berkembang dan masuk ke bidang pendidikan (*Education Guidance*). Ini dirintis oleh Jasse B. Davis. dan sekarang dikenal pula adanya bimbingan dalam segi kepribadian (*Personal Guidance*).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada dasarnya, Bimbingan Konseling tidak hanya berkembang pada bidang-bidang yang dikemukakan di atas yaitu bidang karier dan pendidikan, tetapi juga berkembang di bidang-bidang lain seperti bimbingan dalam bidang sosial, kewarganegaraan, keagamaan, dan lain-lain.

Sebagai profesi yang dilakukan secara profesional bimbingan dan konseling lahir dan berkembang di Amerika Serikat serta mengalami perkembangan yang sangat pesat abad ke-20. Jika ditelaah lebih lanjut, sebenarnya banyak faktor yang mendorong pesatnya perkembangan bimbingan dan konseling ini, yang pada akhirnya mampu dan berkembang di lembaga-lembaga pendidikan formal khususnya sekolah. Menurut beliau lebih lanjut (sebagaimana dikutipnya dari Jareperpus, 2011), sedikitnya ada 6 (enam) faktor yang memelopori perkembangan bimbingan dan konseling tersebut, di antaranya yaitu:

1. Perhatian pemerintah terhadap penduduk imigran yang datang ke Amerika Serikat dari kawasan Eropa ketika itu. Sebagai warga negara yang baik mereka membutuhkan pekerjaan yang layak dan kesejahteraan yang memadai. Dari hal inilah kemudian mereka mendapatkan layanan dari biro-biro vokasional pemerintah. Melalui berbagai penyuluhan yang diberikan mereka dapat mengarahkan dirinya untuk memilih atau menekuni (karier) pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki.
2. Pandangan Agama Kristen yang beranggapan bahwa dunia adalah tempat pertempuran antara kekuatan baik dan buruk, maka atas dasar ini berbagai lembaga pendidikan diwajibkan mengajarkan moral kebaikan agar anak didiknya yang kelak menjadi pemenang dalam melawan kejahatan atau keburukan tersebut, sehingga meraih kesuksesan dalam kehidupan.
3. Adanya pengaruh disiplin ilmu kesehatan mental, yang pada awalnya hanya memperjuangkan perlakuan manusiawi kepada orang-orang yang terkena gangguan kejiwaan dan sedang ditampung di rumah sakit. Kemudian berkembang menjadi gerakan antisipasi terhadap

gangguan mental kepada masyarakat. Mereka (paham ini) beranggapan bahwa gangguan mental dapat di cegah jika mampu dideteksi sejak dini.

4. Dampak dari gerakan testing psikologis yang semakin mengembangkan sayapnya dalam menyusun dan mengembangkan instrumen-instrumen berupa tes-tes kepribadian untuk menyeleksi karyawan diberbagai perusahaan.
5. Subsidi pemerintah terhadap federal yang mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan untuk mengangkat beberapa konselor untuk menangani bimbingan karier, pendidikan karier, penanggulangan kenakalan remaja, antisipasi terhadap penggunaan obat bius, dan lain-lain.
6. Pengaruh dari penyakit therapy nondirektif (client cetered therapy), yang dikembangkan oleh Carl Rogers, dengan menggantikan pendekatan otoriter serta paternalistic dengan pendekatan pada potensi personal kliennya.

Begitulah bimbingan dan konseling berkembang dengan pesat, bahkan dikarenakan berbagai mahasiswa dari berbagai negara melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan berkenalan dengan bimbingan dan konseling, setelah tamat dan kembali ke negaranya masing-masing, maka ilmu tentang bimbingan dan konseling itu dikembangkan pula di negara mereka masing-masing, begitu juga dengan di Indonesia.

Di Indonesia bimbingan dan konseling lahir diawali dari dimasukkannya bimbingan dan penyuluhan (sekarang bimbingan dan konseling) pada *setting* pendidikan formal atau sekolah sejak tahun 1960. Pada waktu dilaksanakan Konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (disingkat FKIP, yang kemudian menjadi IKIP dan seterusnya sekarang menjadi Universitas) yang diselenggarakan di Malang tanggal 20 – 24 Agustus 1960, yang hasilnya bimbingan dan penyuluhan dimasukkan dalam setting pendidikan formal atau sekolah sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Perkembangan selanjutnyayaitu pada tahun 1964 di IKIP Bandung dan IKIP Malang didirikan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan dan seterusnya pada tahun 1971 didirikan pula Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) pada delapan IKIP yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado. Melalui proyek ini Bimbingan dan Penyuluhan dikembangkan,

juga berhasil disusun dan dikembangkan Pola Dasar Rencana dan Pengembangan Bimbingan dan Penyuluhan pada PPSP yang telah dibentuk itu. Dan selanjutnya lahir pula Kurikulum 1975 untuk Sekolah Menengah Atas dan di dalamnya dimasukkan tentang Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah.

Pada perkembangan selanjutnya pada Tahun 1978 diselenggarakan program pula ada yang disebut dengan PGSLP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama) dan PGS LA (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas) Bimbingan dan Penyuluhan di IKIP (setingkat D.II atau D.III) untuk mengisi jabatan Guru Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah. Yang sampai saat itu belum ada jatah pengangkatan guru BP dari tamatan S1 Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan. Pengangkatan Guru Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah mulai diadakan sejak adanya PGSLP dan PGS LA Bimbingan dan Penyuluhan. Keberadaan bimbingan dan penyuluhan secara resmi atau formal diakui tahun 1989 yaitu dengan lahirnya SK Menpan No 026/Menpan/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Keputusan Menteri itu ditetapkan secara resmi adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Namun kenyataannya pelaksanaannya di sekolah masih belum jelas seperti pemikiran awal untuk mendukung misi sekolah dan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan mereka sebagaimana yang diharapkan.

Sesungguhnya sampai tahun 1993 pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah tidak jelas, tidak fokus dan masih mengambang. Parahnya lagi pengguna terutama orang tua murid berpandangan masih kurang sesuai tentang BP, hal ini yang disebut sebagai miskonsepsi tentang bimbingan dan penyuluhan. Muncul pandangan yang salah, antara lain beranggapan bahwa anak yang ke BP identik dengan anak yang bermasalah bahkan anak yang salah, kalau orang tua murid diundang ke sekolah oleh guru BP yang ada dibenak orang tua itu bahwa anaknya di sekolah mesti bermasalah atau ada masalah dengan melakukan berbagai kesalahan atau bahkan melakukan berbagai kejahatan.

Lahirnya SK Menpan No. 83/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang di dalamnya ditemukan aturan tentang Bimbingan dan Konseling di sekolah. Ketentuan pokok dalam SK Menpan itu dijabarkan lebih lanjut melalui SK Mendikbud No 025/1995 sebagai petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Dan melalui SK Mendikbud itu terdapat hal-hal yang substansial, khususnya yang menyangkut bimbingan dan konseling adalah :

1. Istilah bimbingan dan penyuluhan secara resmi diganti menjadi bimbingan dan konseling.
2. Pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah adalah *guru pembimbing*, yaitu guru yang secara khusus ditugasi untuk itu. Dengan demikian bimbingan dan konseling tidak dilaksanakan oleh semua guru atau sembarang guru.
3. Guru yang diangkat atau ditugasi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling adalah mereka yang berkemampuan melaksanakan kegiatan tersebut; minimum mengikuti penataran bimbingan dan konseling selama 180 jam.
4. Kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan pola yang jelas :
a). Pengertian, tujuan, fungsi, prinsip dan asas-asasnya, b). Bidang bimbingan: bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir, c) Jenis layanan: layanan orientasi, informasi, penempatan/penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok dan konseling kelompok, serta d) Kegiatan pendukung : instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah dan alih tangan kasus.
- Unsur-unsur di atas (nomor 4) membentuk apa yang kemudian disebut "BK Pola-17"
5. Setiap kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan melalui tahap : a) Perencanaan kegiatan, b) Pelaksanaan kegiatan, c) Penilaian hasil kegiatan, d) Analisis hasil penilaian, serta e) Tindak lanjut.
6. Kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan di dalam dan di luar jam belajar sekolah.

Hal-hal yang substansial di atas diharapkan dapat mengubah kondisi tidak jelas yang sudah lama berlangsung sebelumnya.

Langkah konkrit diupayakan seperti :

1. Pengangkatan guru pembimbing yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling.
2. Penataran guru-guru pembimbing tingkat nasional, regional dan lokal mulai dilaksanakan.
3. Penyusunan pedoman kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, seperti : a) Buku teks bimbingan dan konseling, b) Buku panduan pelaksanaan menyeluruh bimbingan dan konseling di sekolah, c) Panduan penyusunan program bimbingan dan konseling, d) Panduan

penilaian hasil layanan bimbingan dan konseling, serta e) Panduan pengelolaan bimbingan dan konseling di sekolah.

4. Pengembangan instrumen bimbingan dan konseling.

5. Penyusunan pedoman Musyawarah Guru Pembimbing (MGP)

Dengan SK Mendikbud No 025/1995 khususnya yang menyangkut bimbingan dan konseling sekarang menjadi jelas : istilah yang digunakan bimbingan dan konseling, pelaksanaanya guru pembimbing atau guru yang sudah mengikuti penataran bimbingan dan konseling selama 180 jam, kegiatannya dengan BK Pola-17, pelaksanaan kegiatan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, analisis penilaian dan tindak lanjut. Pelaksanaan kegiatan bisa di dalam dan luar jam kerja. Peningkatan profesionalisme guru pembimbing melalui Musyawarah Guru Pembimbing, dan guru pembimbing juga bisa mendapatkan buku teks.

Sebelum lahirnya BK Pola 17 itu, menurut Prayitno sejak lama pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas, ketidakjelasan dalam pola penyelenggaraan itu menimbulkan berdampak buruk pada citra bimbingan dan konseling, sehingga melahirkan berbagai miskonsepsi terhadap pelaksanaan BK itu. Lahirnya persepsi negatif terhadap pelaksanaan BK, berbagai kritikan muncul sebagai wujud kekecewaan atas kinerja Guru Pembimbing saat itu. Masalah-masalah yang juga berkembang di dunia bimbingan konseling saat itu (sebagaimana dikemukakan Prayitno lebih lanjut, di antaranya; guru pembimbing dianggap polisi sekolah, BK dianggap semata-mata sebagai pemberian nasehat, BK dibatasi pada menangani masalah yang insidental, BK dibatasi untuk klien-klien atau siswa tertentu saja, BK melayani "orang sakit" dan atau "kurang normal", BK bekerja sendiri, konselor sekolah harus aktif sementara pihak lain pasif, adanya anggapan bahwa pekerjaan BK dapat dilakukan oleh siapa saja, pelayanan BK berpusat pada keluhan pertama saja, menganggap hasil pekerjaan BK harus segera dilihat, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien, memusatkan usaha BK pada penggunaan instrumentasi BK (tes, inventori, kuesioner dan lain-lain) dan BK dibatasi untuk menangani masalah-masalah yang ringan saja.

Manakala ditelusuri lebih lanjut mengenai ketidakjelasan dalam pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah itu antara lain disebabkan;

1. Belum adanya dasar hukum

Sejak Konferensi di Malang tahun 1960 sampai dengan munculnya Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan di IKIP Bandung dan IKIP Malang tahun 1964, fokus pemikiran dalam penyelenggaraan bimbingan dan

konseling itu adalah mendesain pendidikan untuk mencetak atau melahirkan yang ketika itu disebut sebagai tenaga-tenaga BP di sekolah. Pada Tahun 1975 dilaksanakan Konvensi Nasional Bimbingan dan penyuluhan I di Malang dan berbagai keputusan penting yang dihasilkan antara lain terbentuknya Organisasi bimbingan dengan diberi nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI). Melalui IPBI inilah kelak gerakan dan perjuangan masyarakat bimbingan dan konseling memperoleh payung hukum dalam pelaksanaannya dan memberikan landasan bagi jelasnya eksistensi bimbingan dan penyuluhan itu di sekolah.

2. Semangat luar biasa untuk melaksanakan BP di sekolah

Lahirnya SK Menpan No. 026/Menpan/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Merupakan angin segar pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah. Semangat yang luar biasa untuk melaksanakan ini karena di dalamnya dikemukakan bahwa tugas guru adalah mengajar dan/atau membimbing. Penafsiran atas pernyataan itu menimbulkan masalah berupa pelaksanaan ini di sekolah tidak hanya dilakukan oleh para lulusan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan atau Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (sejak tahun 1984/1985) tapi juga oleh para guru yang ditugasi sekolah berasal dari guru yang senior atau mau pensiun, guru yang kekurangan jam mata pelajaran untuk memenuhi tuntutan angka kreditnya. Sudahlah pasti penyelenggaraan bimbingan dan konseling itu menjadi tidak jelas, namun patut dihargai dengan ada SK Menpan itu semangat penyelenggaraan BP di sekolah menjadi kuat dan memiliki dasar yang legal. Walaupun dalam pelaksanaannya masih perlu pengarahan.

3. Belum ada aturan main yang jelas

Apa, mengapa, untuk apa, bagaimana, kepada siapa, oleh siapa, kapan dan di mana pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan juga belum jelas. Oleh siapa bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan, di sekolah banyak terjadi diberikan kepada guru-guru senior, guru-guru yang mau pensiun, guru mata pelajaran yang kurang jam mengajarnya untuk memenuhi tuntutan angka kreditnya. Guru-guru ini jelas sebagian besar tidak menguasai dan memang tidak dipersiapkan untuk menjadi Guru Pembimbing. Kesan yang tertangkap di masyarakat terutama orang tua murid Bimbingan Penyuluhan tugasnya menyelesaikan anak yang bermasalah. Sehingga ketika orang tua dipanggil ke sekolah apalagi yang memanggil Guru Pembimbing, orang tua menjadi malu, dan dari rumah sudah berpikir ada apa dengan anaknya, bermasalah atau mempunyai

masalah apakah. Dari segi pengawasan, juga belum jelas arah dan pelaksanaan pengawasannya.

Selain itu dengan pola yang tidak jelas tersebut mengakibatkan muncul berbagai hal terkait dengan pengembangan profesi bimbingan dan konseling; pertama guru BP (sekarang Konselor Sekolah) belum mampu mengoptimalkan tugas dan fungsinya utamanya dalam memberikan pelayanan terhadap siswa yang menjadi tanggungjawabnya. Pada sisi lain yang terjadi malah guru pembimbing atau konselor sekolah itu ditugasi oleh pimpinan di sekolahnya mengajarkan salah satu mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, Kesenian, dsb.nya.

Kedua guru pembimbing merangkap pustakawan, pengumpul dan pengolah nilai siswa dalam kelas-kelas tertentu serta berfungsi sebagai guru piket atau guru penegak disiplin dan guru pengganti bagi guru mata pelajaran yang guru tersebut berhalangan hadir.

Ketiga guru pembimbing ditugasi sebagai "polisi sekolah" yang mengurus dan menghakimi para siswa yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan sekolah seperti terlambat masuk, tidak memakai pakaian seragam atau memakai pakaian seragam yang tidak sesuai atau tidak rapi (misalnya baju yang dikeluarkan dari celana atau rok).

Keempat kepala sekolah tidak mampu melakukan pengawasan dan pengarahan dikarenakan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bimbingan dan konseling, karena tidak memahami program pelayanan serta belum mampu memfasilitasi kegiatan layanan bimbingan di sekolahnya sesuai dengan tuntutan atau prosedur dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah.

Kelima muncul persepsi dan pandangan yang keliru atau miskonsepsi dari personil sekolah terhadap tugas dan fungsi guru pembimbing, sehingga tidak terjalin kerja sama sebagaimana yang diharapkan dalam organisasi bimbingan dan konseling. Kondisi-kondisi seperti di atas, nyaris terjadi pada setiap sekolah di Indonesia.

C. Kompetensi Konselor Sekolah

Kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas, peran, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap-sikap dan nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Standar Kompetensi Konselor Permendiknas No. 27 Tahun 2008, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam 1). kompetensi paedagogik, 2).

kompetensi kepribadian, 3). kompetensi sosial, dan 4). kompetensi profesional.

Menjalani profesi sebagai konselor sekolah sangatlah penting terutama dalam melaksanakan kompetensi bimbingan dan konseling sebagai perwujudan untuk menunjukkan kinerja yang optimal maka semakin tinggi kompetensi konselor sekolah akan berdampak tinggi terhadap kinerja konselor sekolah ABKIN, 2007). Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan melaksanakan tugas melalui pengintegrasian pengetahuan, keterampilan, Sikap, nilai yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di bidang bimbingan dan konseling yang meliputi kompetensi paedagogik, pribadi kompetensi, sosial kompetensi, dan kompetensi professional.

Rumusan Standar Kompetensi Konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atar dasar kerangka fikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun bila ditata ke dalam empat kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam; 1). kompetensi pedagogik, 2). kompetensi kepribadian, 3). kompetensi sosial, dan 4). kompetensi profesional (Permen Diknas, 2008).

1. Kompetensi Pedagogik

a. Menguasai teori dan praksis pendidikan

Mendesripsikan ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya, prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran, dan menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan.

b. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku klien. Melaksanakan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan; kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan; kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan; kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan; kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan.

c. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.

- d. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, non formal dan informal.

2. Kompetensi Kepribadian

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
- b. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih.
Mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk (spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi), menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya, peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, toleran terhadap permasalahan konseli serta mampu bersikap demokratis.
- c. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat
Menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji (seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten); menampilkan emosi yang stabil; peka, bersikap empati, serta menghormati keragaman dan perubahan; menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustrasi.
- d. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi
Melakukan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif; bersemangat, berdisiplin, dan mandiri; berpenampilan menarik dan menyenangkan; berkomunikasi secara efektif

3. Kompetensi Sosial

- a. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja
Memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain (guru, wali kelas, pimpinan sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah) di tempat bekerja; mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja; bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja (seperti guru, orang tua, tenaga administrasi).
- b. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling

Memahami dasar, tujuan, dan AD/ART organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi; menaati Kode Etik profesi bimbingan dan konseling; aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi

- c. Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi
Mengkomunikasikan aspek-aspek profesional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain, memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling, dapat bekerja dalam tim bersama tenaga para profesional dan profesional profesi lain, Melaksanakan referral kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan.

4. Kompetensi Profesional

- a. Menguasai konsep dan praksis penilaian (assessment) untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.
Mendeskrripsikan hakikat asesmen untuk keperluan pelayanan konseling, memilih teknik penilaian sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling, menyusun dan mengembangkan instrumen penilaian untuk keperluan bimbingan dan konseling, mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah peserta didik, memilih dan mengadministrasikan teknik penilaian pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi peserta didik, memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual peserta didik berkaitan dengan lingkungan, mengakses data dokumentasi tentang peserta didik dalam pelayanan bimbingan dan konseling, menggunakan hasil penilaian dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat, menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik penilaian
- b. Menguasai kerangka teoretik dan praksis Bimbingan dan Konseling.
Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling, mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling, mengaplikasikan dasardasar pelayanan bimbingan dan konseling, mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja, mengaplikasikan pendekatan/model/jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling.
- c. Merancang Program Bimbingan dan Konseling.

Menganalisis kebutuhan konseli, menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan konseli secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan, menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling, merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.

- d. Mengimplementasikan Program Bimbingan dan Konseling yang komprehensif.

Melaksanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling, memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli, mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling.

- e. Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling.

Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling, melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling, menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait, menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling.

- f. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional.

Memberdayakan kekuatan pribadi, dan keprofesionalan Guru Bimbingan dan Konseling, meminimalkan dampak lingkungan dan keterbatasan pribadi Guru Bimbingan dan Konseling/konselor, menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional Guru Bimbingan dan Konseling/konselor, mempertahankan obyektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah peserta didik, melaksanakan referral sesuai dengan keperluan, peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi, mendahulukan kepentingan peserta didik daripada kepentingan pribadi Guru Bimbingan dan Konseling/konselor.

- g. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam Bimbingan dan Konseling.

Mendeskripsikan berbagai jenis dan metode penelitian, mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling, melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling, memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling.

Konselor sekolah memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta

didik. Tugas guru bimbingan dan konseling/konselor terkait dengan pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah. Tugas konselor sekolah yaitu membantu peserta didik dalam Pengembangan kehidupan pribadi, Pengembangan kehidupan sosial, Pengembangan kemampuan belajar. Pengembangan Jenis layanan, adalah sebagai berikut: Layanan orientasi, Layanan informasi, Layanan penempatan dan penyaluran, Layanan penguasaan konten, Layanan konseling perorangan, Layanan bimbingan kelompok, Layanan konseling kelompok, Layanan konsultasi, Layanan mediasi.

Kegiatan-kegiatan pendukung adalah: Aplikasi instrumentasi, Himpunan data, Konferensi kasus, Kunjungan rumah, Tampilan kepustakaan, serta Alih tangan kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya (Prayitno, 1997).

D. Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling

Untuk melakukan peningkatan atau pengembangan program peningkatan kompetensi konselor sekolah, maka setidaknya ada dua pihak yang sangat besar memberikan kontribusi terhadap peningkatan tersebut, yaitu pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan organisasi profesi bimbingan dan konseling yaitu ABKIN beserta organisasi profesi sebagai sayapnya. Dalam proses pengimplementasian peningkatan kompetensi konselor sekolah tersebut, maka kedua pihak ini memiliki peran dan tanggung jawab khusus dalam peningkatannya

1. Peran Pemerintah

Jika berbicara mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kompetensi konselor, maka tidak terlepas dari Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Memahami dengan apa yang tertuang dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 maka pemerintah telah mengambil beberapa langkah dalam peningkatan kompetensi tersebut:

- a. Pemerintah telah memformulasi kurikulum yang utuh dalam menciptakan konselor yang profesional. Kurikulum tersebut tidak hanya pada kajian kependidikan, tetapi juga pada kajian profesi atau disebut dengan pendidikan konselor dengan gelar konselor disingkat Kons. Upaya pemerintah dengan terus memberikan pembenahan dan penyempurnaan pada format layanan dan pendukung yang dilaksanakan di sekolah-sekolah.

Sebenarnya sejak tahun 1989, yaitu ketika dikeluarkannya SKB 2 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera RI sudah nampak betapa pemerintah begitu serius, fokus dan aktif dalam memberikan pembenahan pada bimbingan dan konseling di negara ini. Pada ketika itu paling tidak ada beberapa hal yang dilakukan penegasan dan penyempurnaan, antara lain; istilah BP diganti menjadi BK, 1) istilah guru BP diganti menjadi Guru Pembimbing, 2) ditentukan bahwa pertama sekali seseorang diangkat menjadi guru pembimbing minimal berpendidikan DII bimbingan dan konseling, 3) Guru pembimbing memiliki sistem angka kredit dan kepangkatan tersendiri, serta 4) Guru pembimbing memiliki pengawas tersendiri (Prayitno, 2004).

b. Melalui berbagai pembenahan dan perbaikan pemerintah juga mendirikan dan memberikan penguatan pada jurusan atau program studi bimbingan konseling diberbagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (IKIP, STKIP, dll) di seluruh Indonesia. Semula belum ada Prodi BK maka didirikan bahkan dikembangkan sampai pendidikan lebih lanjut, yaitu S2 dan Program Doktor Bimbingan dan Konseling. Diberbagai perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Negeri Semarang telah ada program S2 Bimbingan dan Konseling. Bahkan di UPI Bandung, UM Malang dan sedang dipersiapkan di UNP Padang telah dan akan ada Program Doktor untuk Bimbingan dan Konseling.

c. Selain itu, pemerintah juga memberikan penguatan dengan mengeluarkan izin bagi perguruan tinggi swasta (baik institut maupun STKIP) untuk didirikannya Prodi Bimbingan dan Konseling sebagai lembaga yang mempersiapkan tenaga konselor sekolah diberbagai jenjang pendidikan. Pemerintah merasa bahwa pihak swasta perlu dilibatkan dalam mempersiapkan tenaga konselor sekolah yang memang dibutuhkan. Keterlibatan pihak perguruan tinggi swasta ini telah memberikan kontribusi tersendiri bagi perkembangan Bimbingan dan Konseling di Indonesia. Apalagi dari waktu-kewaktu pembinaan yang diberikan pemerintah terhadap perguruan tinggi (termasuk perguruan tinggi swasta) dari waktu ke waktu semakin baik, yaitu dengan dilakukannya secara efektif tentang akreditasi prodi dan institusi perguruan tinggi, sertifikasi dosen, sistem PDPT dan sebagainya.

d. Penomena pisitif lainnya adalah dibukanya beberapa Prodi BK di perguruan tinggi Agama baik negeri maupun swasta. Sebut saja IAIN Imam Bonjol Padang telah membuka Prodi Bimbingan dan Konseling Islam sejak awal tahun 2000, IAIN Sumatera Utara tahun 2004, dll. Begitu pula diberbagai perguruan tinggi Islam Swasta telah dibuka juga Prodi yang sama. Misalnya Prodi BKI Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan, Prodi BKI Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau Palembang dan sebagainya. Mereka ini memfokuskan kegiatannya pada penyiapan tenaga Konselor untuk ditugaskan di Madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) serta pondok pesantren.

Perhatian yang sedemikian ini tentu memberikan nuansa dan perkembangan Bimbingan Konseling yang sangat pesat di tanah air, yang pada gilirannya tentu akan mengembangkan pendidikan bimbingan dan konseling di Indonesia termasuk bimbingan dan konseling Islam.

e. Dibukanya program Sertifikasi Tes untuk Bimbingan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Program ini ditujukan untuk melahirkan tenaga bimbingan dan konseling yang mampu, memiliki keterampilan serta memangku sertifikasi tes untuk menyelenggarakan tes dalam rangka penelitian, pemahaman individu, penempatan dan penyaluran serta seleksi. Program ini sudah dibuka di Universitas Negeri Malang (sebelumnya IKIP Malang) sejak tahun 2000.

f. Pemerintah telah menetapkan program peningkatan kompetensi konselor sekolah melalui pendidikan profesi yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Sampai saat ini sudah ada beberapa tempat sebagai penyelenggara pendidikan profesi ini, antara lain Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Negeri Semarang (UNES) dan Universitas Negeri Medan dan akan menyusul berbagai perguruan tinggi negeri lainnya. Semua ini sebagai bagian dari pengembangan

2. Peran Organisasi Profesi BK

Bimbingan dan konseling menjadi lebih jelas eksistensinya semenjak terbentuknya IPBI (Ikatanan Petugas Bimbingan Indonesia) pada konverensi pertama di Malang tahun 1975. Peningkatan mutu dan profesionalisasi para konselor yang berada dibawah naungan IPBI yang sekarang berubah menjadi ABKIN dilakukan dengan menetapkan standar kompetensi konselor. Secara internal ABKIN telah menetapkan standar kompetensi ini bagi seluruh konselor dan

calon konselor. Berbagai upaya yang dilakukan ABKIN untuk mendukung terwujudnya tenaga bimbingan dan konseling yang profesional antara lain adalah dengan merumuskan berbagai strategi untuk pengembangan kompetensi konselor sekolah antara lain:

- a. Bersama pemerintah menyiapkan pendidikan konselor
- b. Menyusun butir-butir kompetensi konselor
- c. Penataan pendidikan profesional konselor
- d. Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal
- e. standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor
- f. Sertifikasi guru bimbingan dan konseling
- g. Rancangan Permendiknas tentang Pendidikan Profesi konselor
- h. Pelantikan lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam hal ini di Universitas Negeri Padang (UNP) dan Sertifikasi Jalur Pendidikan dalam hal ini di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
- i. Memfasilitasi pengembangan kurikulum Bimbingan dan Konseling atau Profesi (antara Ketua Program Studi Bimbingan Konseling dan Pakar Konseling serta ABKIN)
- j. Pengangkatan Guru Bimbingan dan Konseling (ke Dinas Pendidikan)
- k. Memberi masukan terhadap rancangan pedoman tugas guru dan pengawas, khusus tentang bimbingan dan konseling.
- l. Memberi masukan terhadap beban kerja dan ratio guru bimbingan dan konseling
- m. Partisipasi dalam musibah, khususnya bencana alam.

Sebagai organisasi profesi dalam bidang bimbingan dan konseling, ABKIN telah pula merumuskan kompetensi konselor yang terdiri dari 7 kompetensi utama yang diterjemahkan lagi ke dalam 27 sub kompetensi untuk memperjelas kompetensi utama serta membantu mempermudah pencapaian kompetensi tersebut. Adapun kompetensi-komptensi tersebut adalah : 1). Penguasaan konsep dan praksis pendidikan, 2). Kesadaran dan komitmen etika profesional, 3) Penguasaan konsep perilaku dan perkembangan individu, 4) Penguasaan konsep dan praksis asesmen, 5). Penguasaan konsep dan praksis bimbingan dan konseling, 6) Pengelolaan program bimbingan dan konseling, serta 7) Penguasaan konsep dan praksis riset dalam bimbingan dan konseling.⁴

⁴ ABKIN. 2007. *Naskah Akademik Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal*, h. 12.

Profesionalisasi BK juga harus memperhatikan kualitas lembaga pendidikan yang menghasilkan konselor yang profesional. Muatan kurikulum dalam lembaga pendidikan para calon konselor, harus mengintegrasikan standar kompetensi konselor, sehingga dalam proses pembinaan konselor profesional dilakukan secara berkesinambungan dan tersistematis dalam kurikulum yang diberlakukan.

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai institusi yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang berlaku bagi seluruh konselor, harus mampu menggandeng lembaga-lembaga pendidikan bimbingan dan konseling, kerjasama yang dilakukan adalah dalam memantau dan menjaga kualitas para konselor dengan proses setifikasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan.

Saat ini program pendidikan yang ada terdiri jenjang S-1, S-2, S-3, sedangkan untuk pendidikan profesi memiliki jenjang tersendiri, namun program ini diperuntukan bagi lulusan S-1 bimbingan dan konseling. Kebijakan dalam pengelolaan pendidikan profesi pun masih belum begitu jelas dan terstandar, sejauh ini program pendidikan profesi baru diselenggarakan oleh Prodi BK Universitas Negeri Padang, dan Program BK Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indoensia. ABKIN seharusnya bisa lebih tegas dalam hal ini, karena ada satu hal yang penting bagi sebuah profesi yaitumendapatkan kepercayaan masyarakat (*Public Trust*). Bigs & Blocher memaparkan tiga komponen yang harus dimiliki oleh sebuah profesi, yaitu : 1). Memiliki kompetensi dan keahlian yang disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus, 2). Ada perangkat aturan untuk mengatur perilaku profesional dan melindungi kesejahteraan publik, 3). Para anggota profesi akan bekerja dan memberikan layanan dengan berpegang teguh pada standar profesi.

Poin kedua menunjukan pada kita bahwa sebuah profesi harus memiliki keketatan aturan karena hal tersebut berhubungan dengan perlindungan kesejahteraan. Kepercayaan publik yang diinginkan oleh setiap profesi ditinjau dari kejelasan regulasi yang terkait dengan program pendidikan, stnadar kompetensi profesional, dan regulasi yang mengatur perilaku profesional konselor (kode etik).

Hal ini harus di awali dengan kejelasan program pendidikan konselor dan program pendidikan profesi konselor yang terstandar secara nasioanal oleh ABKIN, sehingga tidak ada lagi blok dalam pengembangan profesi ini baik dalam pengembangan keilmuan atau dalam praktik layanan. Kebutuhan akan program layanan bimbingan dan konseling saat ini bukan hanya datang dari dunia pendidikan saja, namun bidang-bidang lain seperti dunia usaha

dan industri, kemasyarakatan dan lembaga pernikahan, pelayanan sosial, dan bidang-bidang lain yang memiliki objek utama individu pun menjadi lahan garapan profesi bimbingan dan konseling.

Oleh karena itu kebijakan dari ABKIN dalam mengembangkan profesi bimbingan dan konseling harus bisa membaca ke arah sana, di mana kebijakan ini diberlakukan kepada lembaga pendidikan yang mendidik para calon konselor, dan program pendidikan pasca sarjana dan pendidikan profesi, sehingga kebutuhan dari masyarakat atas keberagaman kebutuhan dari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dapat dilayani oleh para konselor yang kompeten dibidangnya masing-masing.

Gerakan konseling di Indonesia yang dimulai sejak awal tahun 1960-an telah berkembang dan berhasil mewujudkan secara nyata kegiatan konseling sebagai pelayanan profesi bagi warga masyarakat luas, pada *setting* sekolah, perguruan tinggi, instansi resmi dan swasta, dunia usaha dan industri, keluarga, dan kelembagaan kemasyarakatan lainnya. Melalui pembentukan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) tahun 1975 yang kemudian berubah nama menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) tahun 2001, gerakan konseling terus memperkuat diri sehingga keberadaan dan keprofesionalan pelayanan konseling setara dengan pelayanan bidang-bidang profesi lainnya.

Selanjutnya pada tahun 2003 dikeluarkan naskah Dasar Standarisasi Profesi Konseling oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan pokok bagi pengembangan konseling sebagai profesi. Naskah ini telah disosialisasikan ke seluruh wilayah tanah air dan secara formal memperoleh landasan yang kokoh dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang antara lain menyebutkan *konselor* sebagai pendidik. Lebih jauh, ketentuan tentang penyelenggaraan *pendidikan profesi* di perguruan tinggi di dalam undang-undang tersebut memberikan legitimasi dan arah bagi penyelenggaraan pendidikan profesi untuk menyiapkan tenaga profesional konseling yang menyandang gelar profesi *Konselor*. Menyadari tentang keberadaan dan kemanfaatan pelayanan profesi konseling menuju kehidupan masyarakat dan bangsa yang cerdas, modern dan bahagia serta menjunjung tinggi kemartabatan profesi konseling, dalam suasana dan semangat kekeluargaan serta dinamika Kongres X dan Konvensi XIII ABKIN tanggal 13 -16 April 2005 di Semarang, dengan ini para Konselor Indonesia mendirikan organisasi Ikatan Konselor Indonesia yang merupakan divisi dalam ABKIN. Pendirian Ikatan Konselor Indonesia ini disahkan pada Kongres Ikatan Konselor Indonesia I di Padang tanggal 26 s.d 27 Maret 2006. Ikatan

Konselor Indonesia memiliki Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga untuk mengatur kehidupan dan penyelenggaraan organisasi.

E. Strategi Pengembangan Profesi

Akhmad Sudrajat (2010) mengemukakan bahwa strategi pengembangan profesi bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dalam format-format sebagai berikut;

1. Bimbingan Bersifat Klasikal

Layanan dasar ini diperuntukkan bagi semua siswa. Hal ini berarti bahwa dalam peluncuran program yang telah dirancang menuntut konselor sekolah untuk melakukan kontak langsung dengan para siswa di kelas. Secara terjadwal, konselor sekolah memberikan layanan bimbingan kepada para siswa. Kegiatan layanan dilaksanakan melalui pemberian layanan orientasi dan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi siswa. Layanan orientasi pada umumnya dilaksanakan pada awal pelajaran, yang diperuntukkan bagi para siswa baru, sehingga memiliki pengetahuan yang utuh tentang sekolah yang dimasukinya. Kepada siswa diperkenalkan tentang berbagai hal yang terkait dengan sekolah, seperti : kurikulum, personel (pimpinan, para guru, dan staf administrasi), jadwal pelajaran, perpustakaan, laboratorium, tata tertib sekolah, penjurusan (untuk SLA), kegiatan ekstrakurikuler, dan fasilitas sekolah lainnya. Sementara layanan informasi merupakan proses bantuan yang diberikan kepada para siswa tentang berbagai aspek kehidupan yang dipandang penting bagi mereka, baik melalui komunikasi langsung, maupun tidak langsung (melalui media cetak maupun elektronik, seperti: buku, brosur, leaflet, majalah, dan internet). Layanan informasi untuk bimbingan klasikal dapat mempergunakan jam pengembangan diri. Agar semua siswa terlayani kegiatan bimbingan klasikal perlu terjadwalkan secara pasti untuk semua kelas.

2. Bimbingan Kelompok

Konselor sekolah memberikan layanan bimbingan kepada siswa melalui kelompok-kelompok kecil (5 s.d. 10 orang). Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para siswa. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini, adalah masalah yang bersifat umum (*common problem*) dan tidak rahasia, seperti : cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, dan mengelola stress dan lain sebagainya. Topik-topik yang dibahas dapat ditentukan sendiri oleh peserta yang disebut dengan topik bebas serta dapat pula ditentukan pemimpin kelompok atau konselor sekolah yang disebut dengan topik tugas. Layanan bimbingan

kelompok ditujukan untuk mengembangkan keterampilan atau perilaku baru yang lebih efektif dan produktif.

3. Bekerjasama dengan Guru Mata Pelajaran/Wali Kelas

Program bimbingan akan berjalan secara efektif apabila didukung oleh semua pihak, yang dalam hal ini khususnya para guru mata pelajaran atau wali kelas. Konselor sekolah bekerjasama dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang siswa (seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya), membantu memecahkan masalah siswa, dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Aspek-aspek itu di antaranya : (a) menciptakan sekolah dengan iklim sosio-emosional kelas yang kondusif bagi belajar siswa; (b) memahami karakteristik siswa yang unik dan beragam; (c) menandai siswa yang diduga bermasalah; (d) membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar melalui program *remedial teaching*; (e) mereferal (mengalihkan) siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing; (f) memberikan informasi tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang kerja yang diminati siswa; (g) memahami perkembangan dunia industri atau perusahaan, sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada siswa tentang dunia kerja (tuntutan keahlian kerja, suasana kerja, persyaratan kerja, dan prospek kerja); (h) menampilkan pribadi yang matang, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun moral-spiritual (hal ini penting, karena guru merupakan "figur central" bagi siswa); dan (i) memberikan informasi tentang cara-cara mempelajari mata pelajaran yang diberikannya secara efektif.

4. Bekerjasama dengan Orang Tua

Dalam upaya meningkatkan kualitas peluncuran program bimbingan, konselor sekolah perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua siswa. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap siswa tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Melalui kerjasama ini memungkinkan terjadinya saling memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikiran antar konselor dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi siswa atau memecahkan masalah yang mungkin dihadapi siswa. Untuk melakukan kerjasama dengan orang tua ini, dapat dilakukan beberapa upaya, seperti : (1) kepala sekolah atau komite sekolah mengundang para orang tua untuk datang ke sekolah (minimal satu semester satu kali), yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan pembagian rapor, (2) sekolah memberikan informasi kepada orang tua (melalui surat) tentang kemajuan belajar atau masalah siswa, dan (3) orang tua diminta untuk

melaporkan keadaan anaknya di rumah ke sekolah, terutama menyangkut kegiatan belajar dan perilaku sehari-harinya.

Selanjutnya strategi layanan responsif menurut Resa Nur Rahmat (2012) dapat dilaksanakan dalam berbagai format, antara lain; yaitu

1. Konseling Individual dan Kelompok

Pemberian pelayanan konseling ini ditujukan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Melalui konseling, peserta didik (klien) dibantu untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penemuan alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Konseling ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.

2. Alih Tangan Kasus

Apabila konselor sekolah merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah konseli, maka sebaiknya dia mereferal atau mengalihkan konseli kepada pihak lain yang lebih berwenang, seperti psikolog, psikiater, dokter, dan kepolisian. Konseli yang sebaiknya direferal adalah mereka yang memiliki masalah, seperti depresi, tindak kejahatan (kriminalitas), kecanduan narkoba, dan penyakit kronis.

3. Bekerjasama dengan Guru/ Wali Kelas

Konselor sekolah dapat bekerjasama dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang peserta didik (seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya), membantu memecahkan masalah peserta didik, dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Aspek-aspek itu di antaranya : (1) menciptakan iklim sosio-emosional kelas yang kondusif bagi belajar peserta didik; (2) memahami karakteristik peserta didik yang unik dan beragam; (3) menandai peserta didik yang diduga bermasalah; (4) membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar melalui program *remedial teaching*; (5) mereferal (mengalihkan) peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing; (6) memberikan informasi yang *up to date* tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang kerja yang diminati peserta didik; (7) memahami perkembangan dunia industri atau perusahaan, sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada peserta didik tentang dunia kerja (tuntutan keahlian kerja, suasana kerja, persyaratan kerja, dan prospek kerja); (8) menampilkan pribadi yang matang, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun moral-spiritual (hal ini penting, karena guru merupakan "figur central" bagi peserta didik); dan (9) memberikan informasi tentang cara-cara mempelajari mata pelajaran yang diberikannya secara efektif.

4. Bekerjasama dengan Orang tua

Konselor sekolah perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua peserta didik. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya berlangsung di Sekolah/Madrasah, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Melalui kerjasama ini memungkinkan terjadinya saling memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikiran antar konselor dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik atau memecahkan masalah yang mungkin dihadapi peserta didik. Untuk melakukan kerjasama dengan orang tua ini, dapat dilakukan beberapa upaya, seperti: (1) kepala Sekolah/Madrasah atau komite Sekolah/Madrasah mengundang para orang tua untuk datang ke Sekolah/Madrasah (minimal satu semester satu kali), yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan pembagian rapor, (2) Sekolah/Madrasah memberikan informasi kepada orang tua (melalui surat) tentang kemajuan belajar atau masalah peserta didik, dan (3) orang tua diminta untuk melaporkan keadaan anaknya di rumah ke Sekolah/Madrasah, terutama menyangkut kegiatan belajar dan perilaku sehari-harinya.

5. Bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu

Kerjasama dengan pihak-pihak terkait di luar Sekolah/Madrasah ; Yaitu berkaitan dengan upaya Sekolah/Madrasah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan bimbingan. Jalinan kerjasama ini seperti dengan pihak-pihak (1) instansi pemerintah, (2) instansi swasta, (3) organisasi profesi, seperti ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia), (4) para ahli dalam bidang tertentu yang terkait, seperti psikolog, psikiater, dan dokter, (5) MGP (Musyawarah Guru Pembimbing),

6. Konsultasi

Konselor sekolah menerima pelayanan konsultasi bagi guru, orang tua, atau pihak pimpinan Sekolah/Madrasah yang terkait dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para peserta didik, menciptakan lingkungan Sekolah/Madrasah yang kondusif bagi perkembangan peserta didik, melakukan referal, dan meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling.

7. Bimbingan Teman Sebaya

Bimbingan teman sebaya ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik yang lainnya. Peserta didik yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh konselor. Peserta didik yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu peserta didik lain dalam memecahkan masalah

yang dihadapinya, baik akademik maupun non-akademik. Di samping itu dia juga berfungsi sebagai mediator yang membantu konselor dengan cara memberikan informasi tentang kondisi, perkembangan, atau masalah peserta didik yang perlu mendapat pelayanan bantuan bimbingan atau konseling.

8. Konverensi Kasus

Layanan ini adalah untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik itu. Pertemuan konferensi kasus ini bersifat terbatas dan tertutup.

9. Kunjungan Rumah

Kegiatan kunjungan rumah adalah kegiatan untuk memperoleh data atau keterangan tentang peserta didik tertentu yang sedang ditangani, dalam upaya menggentaskan masalahnya, melalui kunjungan ke rumahnya

Selanjutnya Prayitno dkk melalui ABKIN, Universitas Negeri Padang dan teman-teman yang tergabung dalam Ikatan Konselor Indonesia sejak lama merumuskan dan mengembangkan berbagai jenis layanan dan pendukung bimbingan dan konseling. Yaitu yang dikenal dengan nama BK pola 17, BK pola 17 plus dan terakhir adalah BK pola 17 plus yang disempurnakan. Dalam BK pola 17 plus yang disempurnakan itu dikenal layanan-layanan sebagai berikut;

1. Layanan Orientasi

Layanan orientasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut.

2. Layanan Informasi

Layanan informasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien.

3. Layanan Penempatan dan Penyaluran

Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing.

4. Layanan Penguasaan Konten

Layanan penguasaan konten yakni layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan

dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya.

5. Layanan Konseling Individual

Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli/klien. Konseli/klien mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri, kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan ketrampilan psikologi. Konseling ditujukan pada individu yang normal, yang menghadapi kesukaran dalam mengalami masalah pendidikan, pekerjaan dan sosial dimana ia tidak dapat memilih dan memutuskan sendiri. Dapat disimpulkan bahwa konseling hanya ditujukan pada individu-individu yang sudah menyadari kehidupan pribadinya.

6. Layanan Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli/klien. Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran.

7. Layanan Konseling Kelompok

Strategi berikutnya dalam melaksanakan program BK adalah konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan.

8. Layanan Mediasi

Layanan mediasi yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediator.

9. Layanan Konsultasi

Pengertian konsultasi dalam program BK adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. konseling atau psikoterapi sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain.

10. Layanan Advokasi

Layanan yang ditujukan untuk memberikan pembelaan terhadap siswa atau klien yang hak-hak dan dirinya mengalami gangguan karena adanya intervensi, diskriminasi dan pengekangan dalam dirinya sehingga membutuhkan bantuan untuk penyelesaiannya.

Selain itu dalam BK pola 17 plus yang disempurnakan ditemukan pula sebanyak 7 kegiatan pendukung, yaitu; implementasi instrumentasi, himpunan data, kunjungan rumah, konferensi kasus, tampilan kepustakaan dan alih tangan kasus

Layanan bimbingan dan konseling apapun bentuk dan formatnya adalah ditujukan untuk memberikan bantuan atau bimbingan agar anak mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi berkembang secara optimal, mengarahkan agar mereka mampu secara dinamis dan positif menyesuaikan diri dengan keadaan baru baginya, baik lingkungan fisik, sosial emosional maupun lingkungan dalam bentuk perkembangan dunia intelektual/ilmiah, mempersiapkan siswa agar mereka mampu sejak awal mengenali dan mempersiapkan pekerjaan atau karirnya dimasa yang akan datang, serta setiap saat diarahkan agar siswa dapat dibantu atau dibimbing untuk terbebas dari masalah yang dihadapinya.

F. Penutup

Bimbingan dan konseling yang dikembangkan di Indonesia sesungguhnya berasal dari Amerika Serikat, yang ketika kelahirannya adalah melalui penyiapan tenaga guru pembimbing yang akan ditugaskan di sekolah-sekolah. Selanjutnya mengalami dinamika yang meninggalkan sisi negative dan positif bagi perkembangan selanjutnya.

Sebagai tenaga profesional konseling, konselor sekolah adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sedangkan bagi individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan dan konseling disebut klien atau siswa asuh, dan pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan oleh konselor sekolah, sedangkan yang memberikan layanan dalam setting lebih luas (masyarakat) dilaksanakan konselor sebagai gelar profesional setelah seseorang mengikuti pendidikan profesi konselor (PPK).

Konselor sekolah adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal dan non formal. Ekspektasi kinerja konselor dalam menyelenggarakan pelayanan

ahli bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseli, dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan.

Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dikuasai guru Bimbingan dan Konseling/Konselor mencakup 4 (empat) ranah kompetensi, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional

Peran pemerintah dalam meningkatkan kompetensi konselor yaitu: (1) Pemerintah telah memformulasi kurikulum yang utuh dalam menciptakan konselor yang profesional. Kurikulum tersebut tidak hanya pada kajian kependidikan, tetapi juga pada kajian profesi atau disebut dengan pendidikan konselor dengan gelar konselor disingkat Kons, dan (2) Pemerintah telah menetapkan program peningkatan kompetensi konselor sekkolah melalui pendidikan profesi yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

Selanjutnya peran organisasi profesi dalam hal ini ABKIN yaitu: (1) Menyiapkan pendidikan konselor, (2) Penyusunan kompetensi konselor, (3) Penataan pendidikan profesional konselor, (4) Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal, (5) Menyusun standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, (6) Sertifikasi guru bimbingan dan konseling, (7) Rancangan Permendiknas tentang Pendidikan Profesi konselor, (8) Pelantikan lulusan Pendidikan Profesi Konselor dalam hal ini di Universitas Negeri Padang (UNP) dan Sertifikasi Jalur Pendidikan dalam hal ini di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), (9) Memfasilitasi pengembangan kurikulum Bimbingan dan Konseling atau Profesi (antara Ketua Program Studi Bimbingan Konseling dan Pakar Konseling serta ABKIN), (10) Pengangkatan Guru sBimbingan dan Konseling (ke Dinas Pendidikan), (11) Memberi masukan terhadap rancangan pedoman tugas guru dan pengawas, khusus tentang bimbingan dan konseling, (12) Memberi masukan terhadap beban kerja dan ratio guru bimbingan dan konseling, (13) Partisipasi dalam musibah, khususnya bencana alam.

Strategi dasar dan responsif layanan bimbingan dan konseling diarahkan untuk memberikan bantuan kepada siswa atau klien agar mereka dapat menfungsikan seluruh potensi dirinya untuk sukses menjalankan kehidupan, sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagai makhluk Tuhan yang paling indah, paling sempurna dan paling mulia.

DAFTAR BACAAN

- ABKIN. 2007. *Naskah Akademik Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal*.
- Ahmad Sudrajat (2010), *Pengembangan Strategi Dasar Profesi Bimbingan dan Konseling*, Jakarta
- Bimo Walgito, 2010. *Psikologi Umum*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2010
- Gibson, R.L. & Mitchell, M.H. 1987. *Introduction to Guidance*. New York: Macmillan Publisher.
- Permendiknas. 2008. *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dalam Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal*. Jakarta
- Prayitno, 2003, *Pengawasan Bimbingan dan Konseling*, Jakarta; Ikrar Mandiri
- Prayitno, 2007, *Profesionalisme Profesi Konseling*, Jakarta; Depdikbud
- Prayitno, dkk, 2004, *Seri Pemandu Pelaksanaan Layanan BK di Sekolah*, Jakarta; Ikrar Mandiri
- Prayitno, *Layanan Bimbingan dan Konseling*, Jakarta; Depdikbud.
- Prayitno, *Pendukung Bimbingan dan Konseling*, Jakarta; Depdikbud
- Prayitno. 1997. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Ikrar Mandiri
- Resa Nur Rahmat (2012), *Strategi Pengembangan Bimbingan dan Konseling*, Jakarta
- Sisdiknas. 2003. *Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003*. Yogyakarta: Meda Abadi.
- Wieke Octora Olivia (2012), *Perkembangan Bimbingan dan Konseling di Indonesia*, Jakarta

